



KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

Mendorong Transparansi *Beneficial Ownership* dalam Proses Perizinan

Achmad Idrus

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

16 September 2021

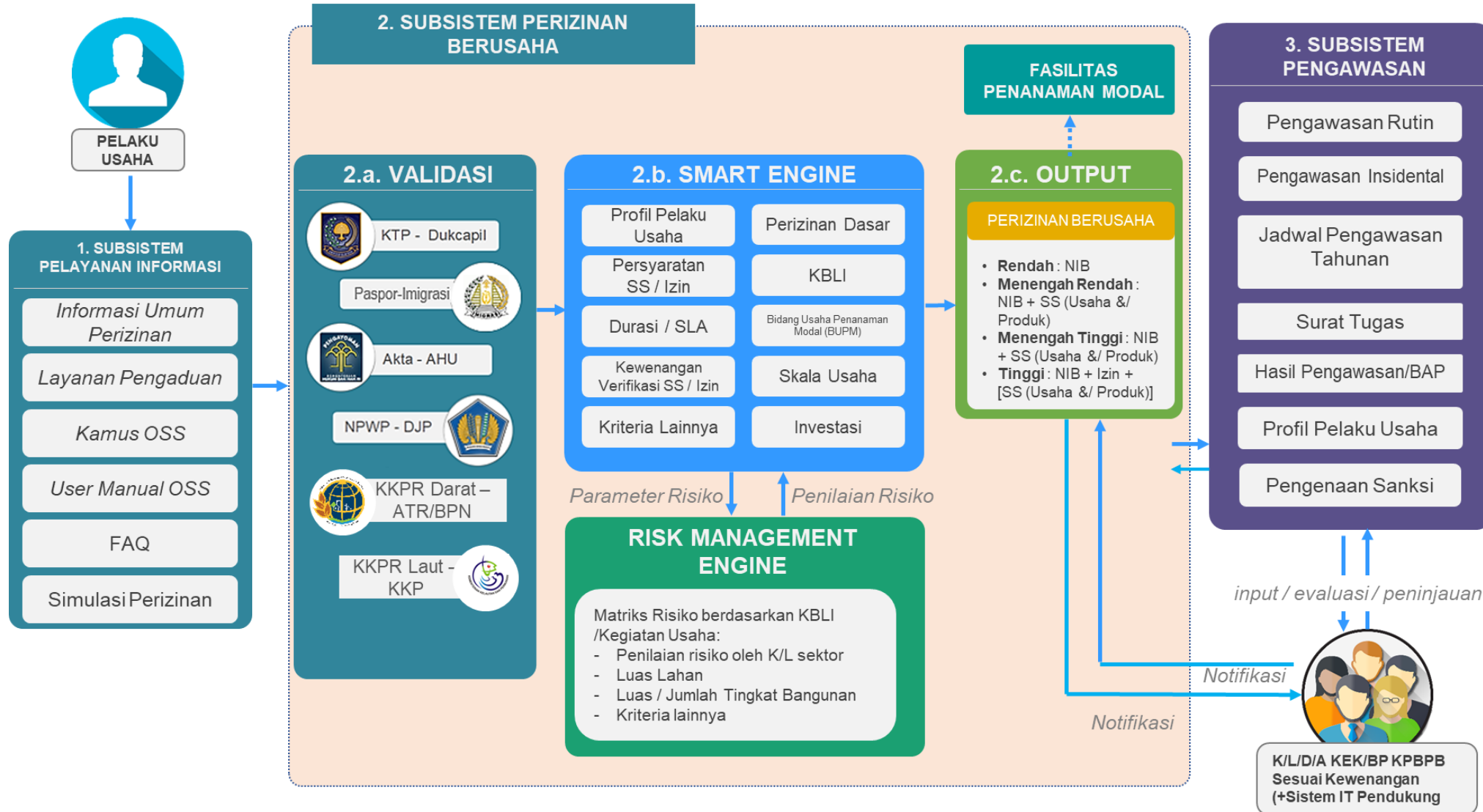
#InvestasiTumbuh
IndonesiaMaju



Perbandingan Perizinan Berusaha Sebelum dan Sesudah UU Cipta Kerja

	Perizinan Berusaha Sebelum UU CK	Perizinan Berusaha Setelah UU CK
Kepastian	Belum ada standar perizinan berusaha di K/L dan daerah	NSPK sebagai acuan tunggal di K/L dan daerah
Kemudahan	Tidak dibedakan kemudahan berdasarkan tingkat risiko, seluruh kegiatan usaha wajib memperoleh izin usaha	Perizinan usaha dibagi berdasarkan tingkat risiko, dan khusus untuk UMK risiko rendah, NIB berlaku sebagai izin tunggal, sertifikasi halal, dan SNI
Transparansi	Beberapa izin masih harus diurus secara manual ke K/L atau Pemda	Seluruh perizinan berusaha dapat diurus melalui OSS
Waktu	Tidak ada standar waktu pengurusan perizinan	Setiap jenis perizinan ada standar waktu dan berlaku mekanisme fiktif positif pada sistem OSS
Biaya	Untuk perizinan dilakukan secara manual sehingga ada potensi terjadi pungli	Biaya ditetapkan dalam PNBP atau retribusi daerah dengan pembayaran online melalui perbankan
Pengawasan	Tidak ada sistem khusus pengawasan	Ada sistem pengawasan untuk usaha untuk pengecekan kepatuhan

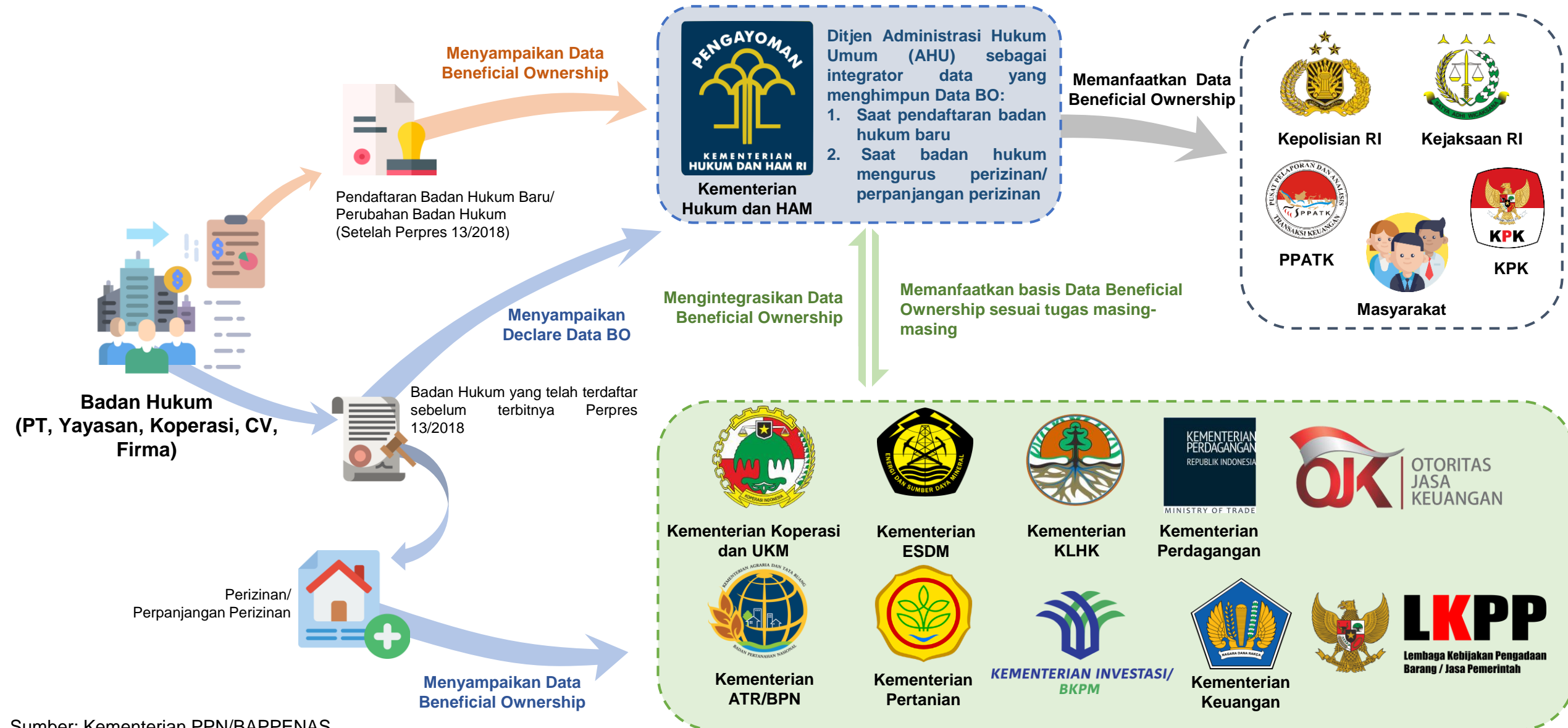
Alur Sistem OSS Berbasis Risiko



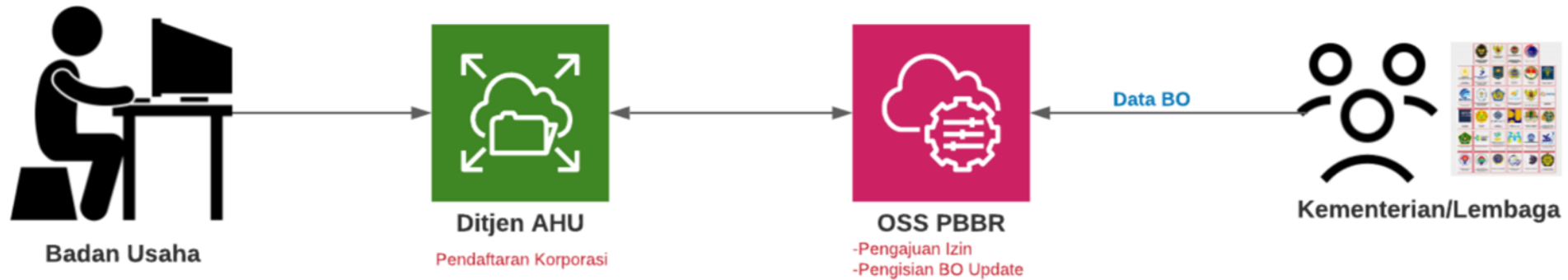


Paradigma perizinan kegiatan berusaha diubah dari berbasis izin ke risiko. Artinya perizinan berusaha dikelompokkan berdasarkan **tingkat risiko usaha** dan tingkat risiko ini menentukan **jenis perizinan berusaha**. Semakin rendah risiko usahanya, maka semakin mudah dan cepat prosesnya.

Proses Bisnis Integrasi Data Pemilik Manfaat



Pemilik Manfaat: Rencana Kementerian Investasi/BKPM ke Depan

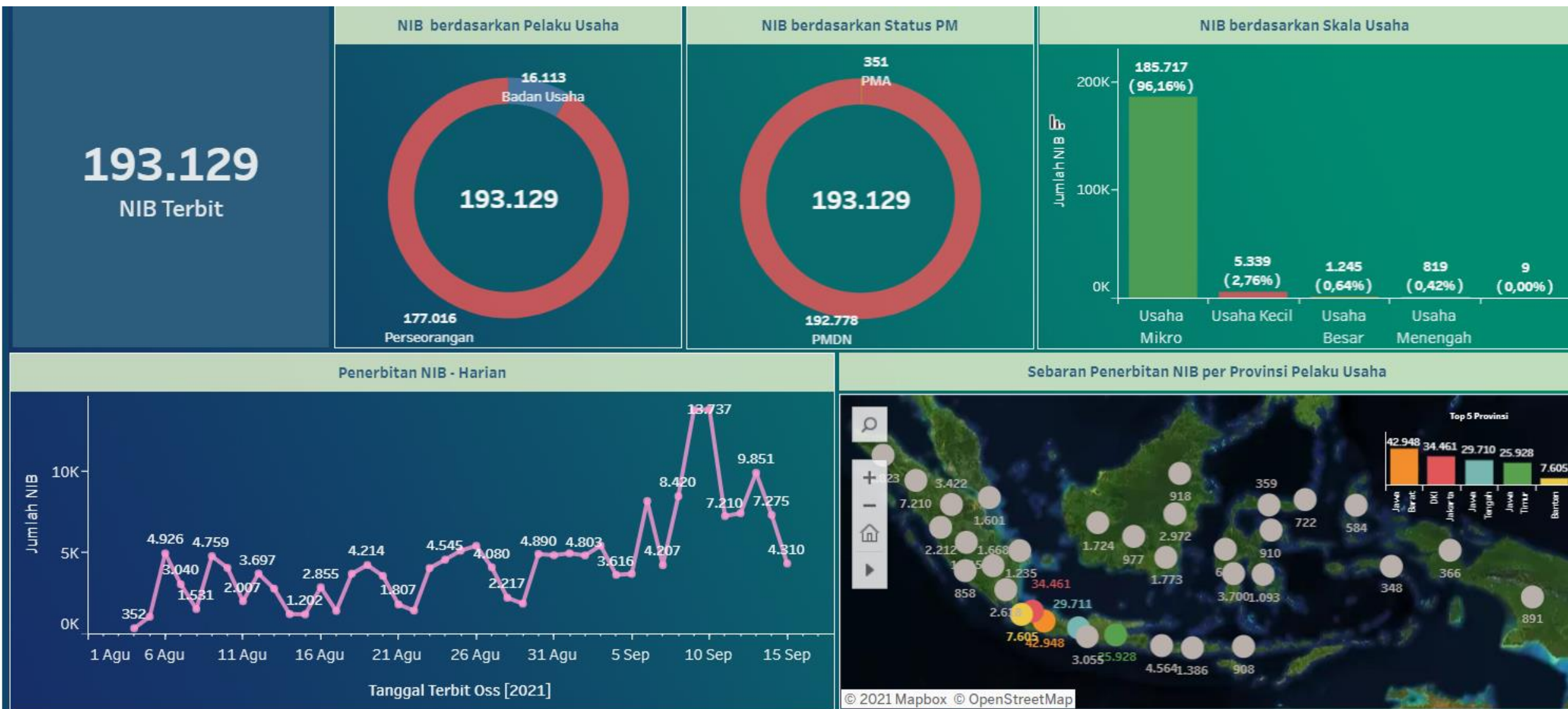


1 Penetapan Regulasi

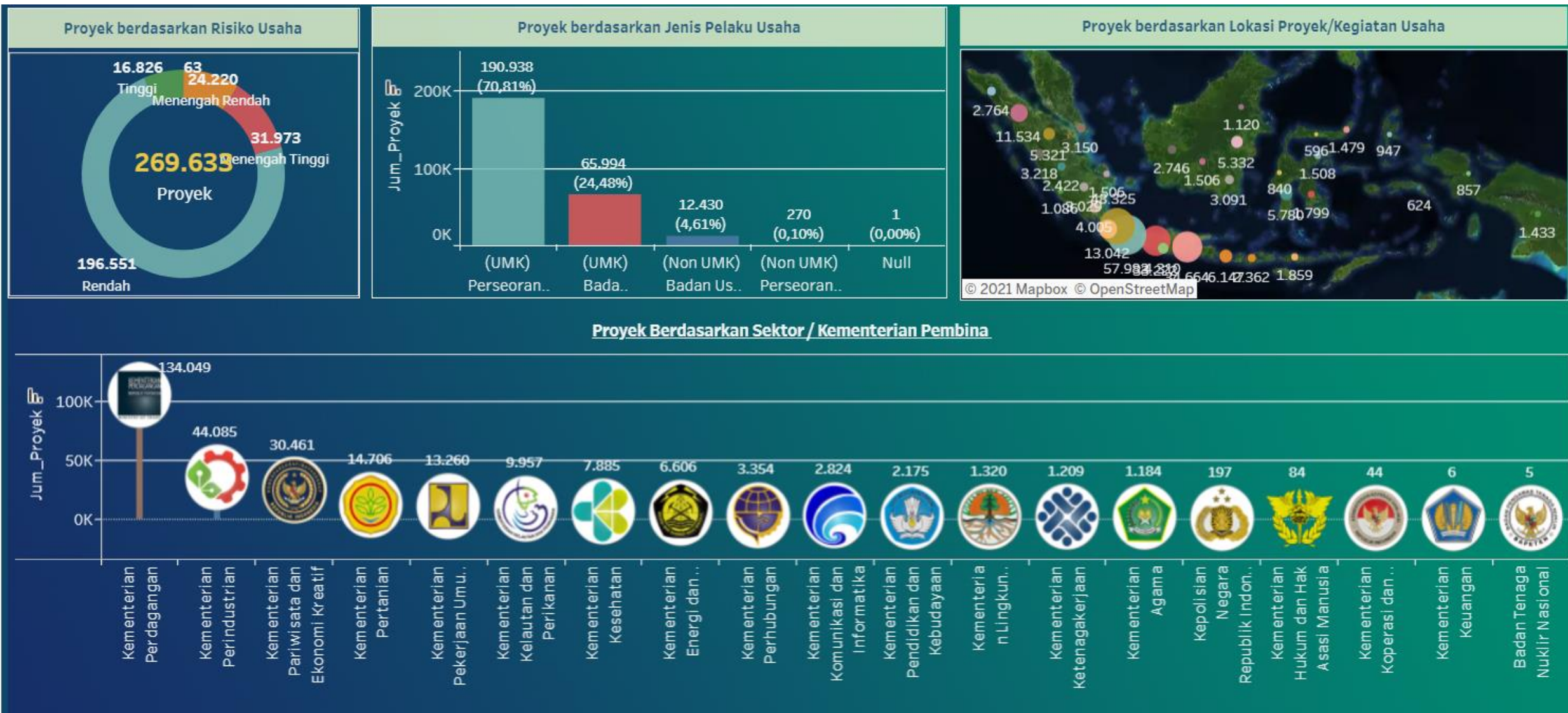
- Kementerian Investasi/BKPM perlu merumuskan dan menetapkan regulasi terkait penerapan *beneficial ownership* bagi Pelaku Usaha.
- Penyampaian informasi *beneficial ownership* dimungkinkan untuk dilakukan di luar proses pendirian badan hukum, dimana dalam hal korporasi belum menetapkan pemilik manfaat, korporasi dapat menyampaikan surat kesediaan untuk menyampaikan informasi pemilik manfaat kepada instansi berwenang.

2 Melakukan Sosialisasi atas akan dilakukannya Penerapan Pemilik Manfaat

Statistik Penerbitan NIB – OSS Berbasis Risiko (4 Agustus 2021 – 15 September 2021 16:00 WIB)



Statistik Proyek/Kegiatan Usaha – OSS Berbasis Risiko (4 Agustus 2021 – 15 September 2021 16:00 WIB)





KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

TERIMA KASIH



Kementerian Investasi/BKPM

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190 - Indonesia

T: +62 21 525 2008 | F: +62 21 525 4945 | E: info@bkpm.go.id

bkpm.go.id | investindonesia.go.id

#InvestasiTumbuh
IndonesiaMaju